

OTONOMI PUSTAKAWAN*

Putu Laxman Pendit**

1. Pendahuluan

- 1.1. Pustakawan adalah profesi, dan karenanya bisa dilihat dari tiga sisi. Dari segi etika, kita melihat profesi dalam kerangka ideal menyangkut moralitas dan manfaat profesi ini bagi masyarakatnya. Dari segi hubungan ilmu dan profesi, kita bisa membahas "isi" dari profesi berdasarkan pondasi keilmiahannya dari kompetensi anggotanya. Dari segi sosiologi, setiap profesi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh institusi lain di dalam masyarakatnya. Walaupun ketiga sisi ini sebenarnya tidak bisa saling dipisahkan, namun untuk kepentingan analisis setiap sisi bisa dilihat secara terpisah.
- 1.2. Makalah ini akan berkonsentrasi ke sisi ketiga, untuk melihat posisi pustakawan *vis a vis* institusi lainnya di masyarakat. Pokok persoalan yang ingin diangkat adalah otonomi pustakawan sebagai profesional. Asumsi dasarnya, pustakawan sebagai insan profesional mampu menentukan sendiri penerapan kompetensi dan keahliannya di masyarakat. Otonomi ini sekaligus merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada sebuah profesi untuk menerapkan keahlian mereka di masyarakat di mana mereka tinggal dan berkarya.
- 1.3. Menurut penulis, memandang otonomi pustakawan dari sisi posisi dan hubungan sosial sangatlah relevan dengan kondisi yang dihadapi pustakawan Indonesia saat ini. Ada dua alasan tentang ini. Pertama, karena di saat ini para pustakawan Indonesia berhadapan dengan pertanyaan pokok tentang apa sebenarnya peran mereka dalam perubahan masyarakat yang sangat mendasar, termasuk khususnya ide tentang demokratisasi, masyarakat madani dan perubahan dalam pemerintahan daerah (otonomi daerah). Kedua, pustakawan berkegiatan di bidang informasi yang saat ini terus menerus berubah dengan cepat, sehingga ada pertanyaan tentang jati diri profesi ini di hadapan profesi-profesi lainnya.
- 1.4. Dari segi etika, IPI boleh saja menyatakan bahwa pustakawan melakukan pekerjaan mulia untuk kesejahteraan bangsa. Tetapi pemeriksaan terhadap Kode Etik IPI tidak akan menjawab persoalan sumbangan yang sesungguhnya diberikan pustakawan Indonesia di lapangan. Terlebih-lebih lagi, nilai sumbangan pustakawan ini sangat bergantung pula dari unsur-unsur lain, baik pihak yang diharapkan menerima manfaat dari kompetensi pustakawan (pengguna jasa perpustakaan, misalnya), maupun unsur-unsur lain. Dari segi kompetensi, ilmu perpustakaan dan informasi bisa saja menyodorkan sederet daftar ketrampilan dan pengetahuan yang ketat. Tetapi pemeriksaan terhadap isi kompetensi sebuah profesi juga tidak menjawab persoalan bagaimana hubungan antara akademisi dan praktisi, atau antara universitas dengan organisasi profesi.

* Makalah untuk Rapat Kerja Pusat XI, Ikatan Pustakawan Indonesia XI dan Seminar Ilmiah, Jakarta 5 - 7 November 2001

** Pengajar di Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

2. Otonomi Profesi dalam Konteks Sosial

- 2.1. Freidson (1994) berpendapat bahwa inti dari profesionalisme adalah kerja (*work*). Dari sisi sosiologi, ada dua persoalan. Pertama, bagaimana membedakan kerja profesional dengan kerja yang lainnya yang mungkin memiliki ciri dan fungsi sama. Untuk ini perlu pengakuan informal maupun formal terhadap kerja itu. Kedua, bagaimana sebuah kegiatan mendapat status kerja di pasar pekerjaan; atau bagaimana sebuah kerja mendapatkan imbalan finansial di masyarakat. Kerja yang tidak dibayar, pada umumnya dianggap tidak profesional, walaupun nilainya mungkin tinggi sekali.
- 2.2. Setiap kerja membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan yang penerapannya membutuhkan pengaturan sosial. Sebuah masyarakat moderen mengelompokkan pekerjaan menurut jenis pengetahuan dan ketrampilan yang menurut masyarakat itu diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu. Tingkat kekhususan (spesialisasi) pengetahuan dan ketrampilan bagi sebuah masyarakat ikut menentukan keprofesionalan sebuah pekerjaan. Seberapa pun bersikerasnya sebuah profesi mengatakan bahwa pengetahuan dan ketrampilan mereka bersifat "khusus", tetapi jika masyarakatnya menganggap pengetahuan dan ketrampilan itu bersifat "umum", maka tetap saja pekerjaannya disebut tidak profesional.
- 2.3. Profesionalisme membutuhkan kemampuan mengambil keputusan, sehingga pengetahuan dan ketrampilan untuk mengerjakan sesuatu yang rutin dan berulang bukanlah pekerjaan profesional. Semakin rumit keputusan yang harus diambil, semakin profesional. Lebih jauh lagi, masyarakat modern menghubungkan profesionalisme dengan kemampuan abstraksi yang didapat dari pengetahuan formal, bukan dari praktek dan kebiasaan.
- 2.4. Selain menegaskan spesialisasi pengetahuan dan ketrampilan, setiap profesi perlu membuat batas yang jelas dengan profesi lainnya. Perkembangan sebuah profesi seringkali berisi perjuangan profesi itu dalam membedakan dirinya --kekhususan pengetahuan dan ketrampilannya-- dari profesi lain. Demarkasi antar profesi ini membentuk sistem pembagian kerja (*division of labor*) yang lebih besar. Sifat dari sistem ini akan dipengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakatnya.
- 2.5. Menurut Friedson, ada tiga kemungkinan sebuah profesi menentukan batas-batasnya. Pertama, batas tersebut diputuskan sendiri oleh anggota-anggota profesi. Kedua, batas tersebut ditentukan oleh pihak yang memakai jasa profesi. Ketiga, batas tersebut ditetapkan oleh sebuah otoritas legal yang tersentralisir (misalnya negara). Profesionalisme yang ideal tentu adalah yang pertama. Tetapi setiap profesi hidup di dalam sebuah pasar kerja dan berhubungan dengan otoritas legal negara yang bisa secara arbitret menetapkan batas-batas profesi.

3. Otonomi Profesi dan Sistem Kerja

- 3.1. Jika profesionalisme berintikan kerja, maka kita bisa melihat sistem kerja (*labour exchange systems*) sebagai tempat di mana setiap orang dalam angkatan kerja memberikan sebuah jasa -baik itu berupa upaya, pertimbangan, nasihat, dsb- kepada orang lain atau ke sebuah organisasi, dan dibayar untuk itu. Dalam konteks

profesionalisme sistem kerja secara garis besar dapat di bagi dalam dua model. Masing-masing model memiliki dua tipe spesifik.¹

- 3.2. **Model Profesional - Klien Tipe 1 (tipe "ideal").** Tipe ini bersifat ideal dalam hal kendali atas pemberian jasa profesional dan kompensasinya. Seorang profesional memberikan jasa berdasarkan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh klien, sehingga klien bergantung kepada etika dan kompetensi profesi. Peran asosiasi profesi dalam menjaga standar profesi di sini sangat besar karena klien dalam posisi lemah. Sementara itu, si profesional yang "*self-employed*" seperti ini relatif otonom dalam memilih klien, kapan dan bagaimana melayani, serta berapa akan meminta bayaran. Dalam hal ini perkembangan karir sejalan dengan perkembangan profesi.
- 3.3. **Model Profesional - Klien Tipe 2 - Klien Tunggal.** Semakin sedikit jumlah klien yang dilayani, kekuasaan klien mengendalikan waktu kerja, jenis pekerjaan, bayaran, dsb. semakin meningkat, sampai ke suatu titik di mana profesional hanya melayani satu klien. Di sini sebenarnya si profesional sudah lebih mirip sebagai pegawai, walaupun sifat hubungan profesional - klien masih ada. Di sini, otonomi profesi sangat berkurang dan kendali pindah ke klien tunggal tersebut. Standar profesi akan dipengaruhi oleh klien, selain oleh asosiasi profesi. Kemampuan profesional akan dipersempit untuk memenuhi satu keperluan dari satu klien, dan bukan untuk beragam keperluan dari beragam klien. Dengan demikian kemampuan memberi penilaian dan pertimbangan pun akan terbatas. Kalau profesi tidak mau melayani si klien, profesi ini akan kehilangan pekerjaannya.
- 3.4. **Model Pekerja - Majikan Tipe 1 - Pelanggan Terlihat.** Profesional yang menyediakan jasa dalam model profesional - klien di atas adalah sekaligus pekerja dan majikan. Kalau kedua fungsi dipisahkan, bertambah lah kesulitan yang dihadapi profesional dalam memenuhi kriteria profesional dalam hal otonomi, komitmen, identifikasi, dan etik. Si profesional kini bertanggungjawab secara harian kepada majikan. Orang atau orang-orang yang menerima jasa adalah nasabah dari si majikan. Nasabah membayar majikan, dan majikan membayar pegawai atas jasa yang diberikan kepada nasabah. Jelas bahwa majikan ingin mengendalikan kepada siapa, kapan, dan dalam kondisi apa pegawainya memberikan jasa. Majikan juga ingin menilai kinerja, kompetensi, dan etika dari pegawai. Majikan pada umumnya tidak setuju jika tugas ini dilaksanakan oleh asosiasi profesional, walaupun mereka tidak menolak adanya pembagian peran kontrol ini. Majikan akan punya kecenderungan kuat untuk mereduksi pekerjaan besar yang rumit menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil. Satu orang akan ditugaskan untuk mengerjakan setiap bagian kecil itu secara rutin dan terpolo. Akibatnya, kebutuhan untuk memiliki pengetahuan yang luas dan pengambilan keputusan berkurang. Juga akan mudah bagi majikan untuk mengganti-ganti orang. Otonomi berkurang, ditambah dengan intervensi majikan ke bidang-bidang seperti standar, etika, kompetensi. Karir dan perkembangan tergantung pada majikan.
- 3.5. **Model Pekerja - Majikan Tipe 2 - Pelanggan Tidak Terlihat.** Otonomi profesi semakin terancam jika jasa dari si pegawai dipakai untuk membuat sebuah produk untuk majikan yang kemudian menjualnya kepada pelanggan. Sekarang, pelanggan "tidak nampak" bagi si profesional. Majikan, dalam rangka memenuhi kebutuhan

¹ Diadaptasi dari penjelasan the Association of Professional Engineer, Geologist and Geophysicist of Alberta - www.apegga.com.

pelanggan dan pemegang saham, mendikte standar, etika, kondisi kerja, skala gaji, dan perkembangan karir dari para pegawai. Profesional yang bekerja dalam sistem seperti ini tidak ada bedanya dengan pekerja lain. Bisa muncul tekanan sangat kuat pada pegawai profesional untuk meninggalkan konsep profesionalisme, terutama konsep yang dianggap akan menghalangi karir. Ini berarti ada tendensi untuk lebih loyal kepada perusahaan daripada kepada "profesi".

4. Otonomi Profesi dan Institusi Pendidikan

- 4.1. Untuk menjaga otonominya, sebuah profesi seringkali merujuk ke sebarang pengetahuan formal. Di sini, hubungan profesi dengan institusi pendidikan (universitas) menjadi faktor penentu. Day (1997) menggambarkan bahwa secara ideal, universitas ditandai oleh ketiadaan kepentingan (*disinterestedness*) karena bekerja untuk kepentingan umum. Ketidadaan kepentingan ini menjadi sumber motivasi dan bahan baku profesional, karena seorang profesional adalah orang yang punya otoritas dalam bidangnya, bertindak secara otonom memakai material yang dipilihnya sendiri, dan bukan dipaksa atau diancam bertindak oleh kekuatan di luar kompetensi profesionalnya.
- 4.2. Berlandaskan ke-"murni"-an ilmu, universitas menjadi *the chief authority* dalam berbagai pengetahuan. Sebab itulah, banyak bidang profesi berupaya mengembangkan diri mereka di dalam universitas agar bisa memberikan status sosial-ekonomi kepada para anggotanya. Otoritas universitas dimulai dari pemikiran, maka universitas berkembang di sekitar "*life of the mind*," terutama "*the mind of science*", yang adalah pemikiran rasional. Dengan mengaitkan diri ke universitas, sebuah profesi meraih status rasional otonom atas kegiatan-kegiatan anggotanya.
- 4.3. Dalam menjaga rasionalitas dan otonominya, universitas menegaskan pentingnya riset. "Riset" bukan saja merupakan fungsi dari ilmu untuk menemukan kebenaran universal, tetapi juga harus mengarahkan proses pengajaran sehingga siswa dapat bekerja langsung di bawah gurunya dalam menemukan kebenaran. Selain itu, universitas beranggapan bahwa pengetahuan murni hanya dapat dihasilkan jika riset dan perisetnya berada dalam "*isolation and freedom*". Bahkan isolasi ini seringkali diartikan sebagai jarak yang memisahkan universitas dari masyarakat, dan akhirnya menimbulkan kesan "menara gading". Salah satu risiko profesi yang mencari landasan otonominya di universitas, dengan demikian, adalah keterpisahan profesi itu dari masyarakat umum.
- 4.4. Pengetahuan "murni" mendapat tantangan dari pengetahuan "praktis" ketika orang mempersoalkan kegunaan aplikatif dari ilmu yang dipelajari para calon profesional di universitas. Dalam hal ini, profesionalisme berpaling dari "identifikasi dengan pengetahuan" ke "penguasaan dan pengendalian terhadap aplikasi". Profesi tidak lagi mengutamakan kemurnian pengetahuan, melainkan seberapa jauh seorang profesional dapat menguasai dan mengendalikan penerapan ilmu-ilmu formal yang dipelajarinya di universitas. Maka universitas menyediakan "sistem" atau "paket" yang bisa membantu sebuah profesi menetapkan kompetensi khusus anggota-anggotanya, sekaligus melatih mereka menggunakan kompetensi tersebut. Universitas berperan sangat besar dalam menentukan batas-batas internal maupun eksternal sebuah profesi.

- 4.5. Model teknis-rasional dominan sepanjang pemikiran profesionalisme abad 19 dan 20. Perspektif baru, misalnya sebagaimana yang disinyalir Handy (1989) dan Habermas (1977), melihat bahwa kerja profesional merupakan aktifitas interpretif dan kreatif, selain teknis. Praktik jaman kini melibatkan dilema nilai, konteks sosial-ekonomi yang rumit, dan situasi yang hakikat teritorinya terus berubah, tetapi juga batas-batasnya selalu kabur. Menurut Lester (1995) praktisi bekerja di sebuah sistem yang rumit dan dinamis. Sebelum bisa menerapkan solusi, seorang praktisi harus dapat men-"teori"-kan situasi yang dihadapinya. Praktisi melakukan refleksi intelektual dalam situasi yang "berantakan". Ia memang menggunakan pengetahuannya, tetapi ia juga memerlukan kemampuan sintesis, pemahaman situasi, etika, dan kemampuan menginterpretasi makna dari sebuah situasi dari berbagai perspektif dan sisi pandang. Di lapangan kerja, situasinya semakin memperlihatkan antar-keterkaitan, keragaman nilai, bukan reduksionisme teknis-rasional.
- 4.6. Situasi baru ini secara tidak langsung telah memindahkan tanggungjawab dalam menetapkan perilaku profesional ke masing-masing praktisi individual, membuka kemungkinan otonomi ideal. Pada saat sama, situasi ini juga mempertanyakan batas-batas profesional tradisional. Hubungan antar-profesional dan pendekatan multi-disiplin menjadi semakin sering terjadi. Sementara itu, "sistem" atau "paket" yang dihasilkan universitas mengalami standarisasi, isi dari pendidikan universitas mengalami institusionalisasi "objektif". Sistem profesional dari universitas berpindah ke wilayah teknis yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, peralatan (teknologi).

5. Otonomi Profesi dan Kekuasaan Negara

- 5.1. Sebuah masyarakat "menciptakan" sebuah profesi untuk memastikan tersedianya produk atau layanan yang tidak bisa disediakan oleh "orang biasa" karena prosesnya yang rumit. Masyarakat memberikan "mandat" kepada pihak lain untuk ini, antara lain kepada negara dan pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk bertindak atas nama masyarakatnya. Filsuf Plato dalam bukunya *The Statesman* yang ditulis berabad-abad silam sudah mengusulkan ide tentang "profesional di bidang pemerintahan" (lihat misalnya tulisan Ciger, 1990) untuk menjamin komitmen negara terhadap masyarakat. Tetapi ide dasar ini tidak mudah terwujud. Dari sisi pandang negara, sebenarnya profesionalisme pegawai negeri bisa menjamin: (a) adanya kompetensi minimum setiap pegawai, (b) aparat yang bisa mengatur dirinya sendiri demi efisiensi dan efektifitas layanan publik, dan (c) kenetralan dalam pelayanan (tidak diskriminatif). Profesionalisasi pegawai pemerintah juga dapat memastikan dipertahankannya nilai-nilai layanan publik dari gerusan komersialisasi yang dikembangkan oleh pihak pasar (Montgomery, 1998).
- 5.2. Di lain pihak, sebuah kelompok profesi di luar negara akan memiliki kekuasaan berdasarkan pengetahuan dan keahlian serta mandat yang diberikan masyarakat kepadanya. Ini dapat diartikan sebagai saingan terhadap kekuasaan negara, terutama jika negara tersebut beraliran totalitarian. Di bekas Uni Soviet, misalnya, semua sumber kekuasaan harus ada di tangan negara. Layanan profesional direduksi menjadi satu unit administrasi yang terpusat dan dikendalikan oleh aturan-aturan birokrasi sebagai perwujudan dari nomenklatur Partai Komunis. Akibatnya, tidak ada *professional meritocracy*, kebebasan profesi, organisasi profesional yang independen, maupun transparansi. Karir profesional bukan ditetapkan oleh keahlian, tetapi oleh ketaatan kepada partai dan loyalitas kepada pemimpin partai. Semua institusi profesi diberangus (lihat Hudson, 1994 dan Jones, 1991).

- 5.3. Sementara itu, ada juga yang memandang profesionalisasi pegawai negeri sebagai problem baru. Fred Riggs (1997) misalnya menganggap bahwa profesionalisasi meningkatkan kekuasaan administrator publik dan birokrat, sehingga muncul masalah hubungan fungsional antara politisi dan administrator. Bert A. Rockman (1997) mengingatkan kemungkinan bentrok antara "akuntabilitas", "ketanggapan (*responsiveness*), dan "tanggungjawab" profesional pemerintahan. "Akuntabilitas" berkaitan dengan ketaatan hukum. "Ketanggapan" berkaitan dengan komitmen kepada janji politik. "Tanggungjawab" berkaitan dengan keterikatan etik dan ketrampilan profesional. Bagi pegawai negeri, *the art of being professional* seringkali merupakan ketrampilan khusus untuk mengelola ketiga tuntutan ini.
- 5.4. Frederick C. Mosher (1968) juga mengingatkan bahwa profesional di bidang publik dapat menjadi sangat berorientasi birokrasi yang kaku dan super-tertib *ala* Max Weber. Birokrasi profesional bisa menjadi terlampau sempit sehingga menimbulkan *parochialism*; tidak mampu keluar dari rasionalitas teknis, sehingga pendekatannya cenderung tidak kontekstual. Lalu akan muncul kompartementalisasi, spesialisasi dan akhirnya egoisme sektoral yang menghambat komunikasi, kerjasama, dan organisasi antar administrasi publik.
- 5.5. Kultur sebuah masyarakat ikut menentukan posisi profesional dalam konteks pelaksanaan negara dan politik. Profesional di negeri Cina, misalnya, terikat tradisi Konghucu tentang tanggungjawab moral seseorang yang berpengetahuan (*knowledgable person*) terhadap masyarakatnya. Seorang profesional Cina merasa wajib terlibat dalam kehidupan sosial-politik dan tidak jarang menggabungkan nasionalisme dengan profesionalisme². Pada gilirannya, profesionalisme ini juga diterjemahkan sebagai kewajiban negara (dan pegawai negeri) untuk mengurus masyarakat lewat pendekatan *top-down* dan berdisiplin. Tradisi "negara profesional" ala Konghucu ini bertahan sampai sekarang di negeri-negeri Asia Tenggara, terutama Singapura, Taiwan, Hong Kong dan Korea Selatan (lihat Huque, Lam dan Lee, 1996).

6. Kepustakawanan dan Negara Indonesia

- 6.1. Pada kesempatan lain, penulis telah membahas kepustakawanan Indonesia terutama dalam konteks sosial dan perkembangan sejarah (Pendit, 1988, 1992a, 1992b, 1993). Sebagaimana kepustakawanan lainnya di dunia, kepustakawanan Indonesia lahir dalam konteks sosial yang spesifik. Khusus untuk Indonesia, maka ciri utamanya adalah kuatnya peran pemerintah dan negara dalam segala segi, selain keikut-sertaan kaum elit-intelektual. Lebih jauh lagi, kepustakawanan Indonesia tumbuh dalam lingkungan informasi yang berakar pada tradisi yang membenarkan pusat kekuasaan sebagai sekaligus pusat dan sumber informasi. Tradisi ini adalah tradisi kraton, yang oleh Kuntowijoyo (1987) digambarkan sangat baik lewat telaah tentang peran pujangga kraton, *abdi dalem dalang* dan *abdi dalem juru sungging* di kerajaan-kerajaan Jawa.
- 6.2. Belanda ikut menumbuhkan kepustakawanan modern Indonesia dalam kerangka Politik Etis yang dalam awal abad 20-an antara lain membangun 680 perpustakaan umum di bawah koordinasi Komisi Bacaan Rakyat (*Comissie voor de Inlandsche*

² Pembahasan yang menarik tentang ini dapat dilihat di www.aasianst.org/abss/1997abst/china/c73.htm

School en Volkslectuur) yang kemudian menjadi Balai Pustaka. Sampai tahun 1930, pemerintah kolonial telah membangun 2.686 perpustakaan untuk umum (Hardjo-Prakoso, 1975, h. 29). Pada saat bersamaan Belanda juga membangun sistem pendidikan modern yang antara lain memungkinkan kaum ningrat belajar budaya Barat. Semua ini, menurut Setiadi (1991), termasuk dalam strategi pemerintah kolonial untuk ikut berperan dalam pembentukan budaya dan perkembangan intelektual Indonesia lewat kendali dan monopoli informasi. Balai Pustaka menjadi mesin utama Belanda untuk menulis naskah, mencetak, menerbitkan sampai menyebarkannya lewat perpustakaan, termasuk lewat Taman Poestaka dan perpustakaan keliling. Ditambah lagi, minat orang-orang Belanda pada budaya, bahasa, dan tanaman Indonesia untuk kepentingan kolonialisme ikut menyumbang pada perkembangan perpustakaan (Sulistyo-Basuki, 1998).

- 6.3. Pada 1951, hanya dua tahun setelah akhir perang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memutuskan untuk mengkoordinasi perpustakaan umum dengan fokus utama pada pemberantasan buta huruf. Menurut Hadi (1956) pemerintah merencanakan 189 perpustakaan wilayah dengan 2.657 cabang, ditambah 14.377 perpustakaan desa. Pada tahun sama didirikan Biro Perpustakaan yang mulai bekerja tiga tahun kemudian (Tjoen dan Pardede, 1966) dengan tugas menyelenggarakan perpustakaan "demi kepentingan pemerintah". Pemerintah pula lah yang memobilisasi peminat kepustakawanan untuk mengisi lowongan pekerjaan di perpustakaan.
- 6.4. Catatan konsultan UNESCO, AGW Dunningham, memperlihatkan bagaimana upaya pengembangan kepustakawanan Indonesia di tahun-tahun tersebut tidak terlepas dari perkembangan terakhir pemerintahan kolonial (lihat Williamson, 1999). Pendamping pertama konsultan ini seorang Belanda, S. Koperberg, yang adalah pustakawan teman dekat Bung Hatta, tokoh kita yang sangat memperhatikan perpustakaan itu. Seorang Belanda lainnya, Cora Vreede-de Stuers, menjadi salah satu penanggungjawab pendirian balai pendidikan untuk pustakawan Indonesia, sementara kurikulumnya ditulis oleh AH. Habraken (lihat Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia, 1998). Pada waktu itu peninggalan kepustakawanan Belanda cukup utuh, termasuk dalam bentuk sistem perpustakaan yang berdasarkan tradisi kepustakawanan kolonial dengan sistem tertutupnya dan ketertiban katalogisasinya. Pendidikan para pustakawan yang menangani kelanjutan kepustakawanan peninggalan Belanda itu pun diarahkan untuk meneruskan tradisi ini.
- 6.5. Ada beberapa hal yang menarik untuk digarisbawahi. Dalam kunjungan ke Padang, Dunningham telah melihat adanya kontras antara perpustakaan peninggalan Belanda yang cenderung besar tetapi sepi dibandingkan dengan perpustakaan yang kecil, di dekat sebuah restoran, tetapi penuh pengunjung. Ia mencatat perlunya perpustakaan memiliki pimpinan yang inovatif. Di Medan, ia bertemu dengan pustakawan yang berhasil membujuk pengelola perpustakaan peninggalan Belanda untuk mengganti sistem tertutup menjadi sistem terbuka. Sementara itu, ia juga mencatat betapa birokrasi negara yang baru merdeka ini juga menghambat produksi dan impor buku. Korupsi pun menurutnya telah muncul dalam perkara pengadaan buku, walaupun dalam jumlah yang kecil. Hasil-hasil pengamatan Dunningham ini dituangkannya dalam sebuah laporan kepada UNESCO.
- 6.6. Pada masa awal Orde Baru, Biro Perpustakaan dihapus dan diganti menjadi Lembaga Perpustakaan; Departemen Pendidikan Massa juga diganti menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat, dan semua perpustakaan yang ada di

bawahnya berganti nama dari Perpustakaan Rakyat menjadi Perpustakaan Masyarakat. Pemerintah pusat mengalihkan penanganan perpustakaan umum ke pemerintah daerah. Pada awal Orde Baru pula organisasi profesi pustakawan diaktifkan kembali dengan nama Asosiasi Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Indonesia setelah empat tahun tidak aktif karena "kesulitan yang ditimbulkan oleh G30SPKI". Pada awal pengaktifannya, organisasi ini "membersihkan diri dari anarsir-anarsir G30SPKI", serta ikut mengutuk PKI dan menyatakan diri sebagai "bukan gerakan buruh". Dalam salah satu pasalnya, APADI "menyediakan diri untuk membantu pemerintah, lembaga-lembaga ilmiah, karyawan" Dengan kenyataan seperti itu, cikal bakal profesi pustakawan di awal Orde Baru telah secara tegas mengafiliasikan diri mereka kepada pemerintah. Tidak satu pun pasal organisasi ini menyebut tentang masyarakat. Ketika kemudian organisasi ini berubah menjadi Ikatan Pustakawan Indonesia, tujuan organisasi dikembangkan lebih luas lagi menjadi "demi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kesejahteraan masyarakat". Sedangkan dalam kegiatannya, IPI juga kembali menyatakan secara spesifik akan "menyumbangkan pikiran dan tenaga kepada pemerintah". Setelah dimutakhirkan, IPI bahkan lebih spesifik lagi menyatakan bahwa organisasi ini bertujuan "mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara". Salah satu kegiatan untuk ini adalah mengusahakan keikutsertaan pustakawan dalam "program pemerintah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi". (lihat Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia, 1998).

- 6.7. Sebagai sebuah organisasi profesi, IPI di masa Orde Baru memperlihatkan ciri dari organisasi massa pada umumnya di masa itu, yaitu kuatnya pengaruh pemerintah pusat dalam kepengurusan dan program-program kegiatannya. Sepanjang hidupnya, Pengurus Besar IPI didominasi tokoh-tokoh pemerintah pusat, terutama Perpustakaan Nasional. Sejak kongres pertamanya di tahun 1977, organisasi ini dipimpin 7 kali oleh pegawai tinggi Perpustakaan Nasional, dan satu kali oleh pegawai di luar Perpustakaan Nasional. Program-program kerja IPI secara nasional pada umumnya adalah "program pemerintah" dan keanggotaannya secara mencolok didominasi oleh pustakawan pegawai negeri. Secara kentara pula, setiap kongres organisasi ini mengandung satu tema pokok yang seragam dengan tema-tema pemerintah Orde Baru, sebagaimana bisa disimak di tabel berikut:

Tabel 1 Tema-tema Kongres IPI

Kongres I	Peningkatan peranan IPI dalam mencerdaskan bangsa dan mensukseskan pembangunan Indonesia.
Kongres II	Memasyarakatkan jasa perpustakaan dan meningkatkan partisipasi pustakawan dalam pembangunan.
Kongres III	Dengan perpustakaan kita tingkatkan kecerdasan bangsa dan pembangunan.
Kongres IV	Kita tingkatkan peranan perpustakaan dalam menunjang pembangunan masyarakat desa.
Kongres V	Meningkatkan peranan perpustakaan dalam menyongsong era tinggal landas pembangunan.
Kongres VI	Peranan perpustakaan dalam era globalisasi informasi.
Kongres VII	Peran strategis pustakawan dalam pembangunan nasional.

- 6.8. Hal lain yang juga mencolok dalam perkembangan IPI di masa Orde Baru adalah peran organisasi ini dalam mengembangkan profesionalisme pustakawan pegawai

negeri lewat sistem akreditasi yang mencerminkan pekerjaan pustakawan sebagai mekanistik-birokratis. Upaya akreditasi ini mencerminkan kehendak untuk menyeragamkan tindakan para pustakawan di seluruh Indonesia, terutama yang bekerja di pemerintah. Lewat standardisasi seperti ini, maka ketrampilan pustakawan pegawai negeri diawasi oleh kelompok-kelompok pembina yang diisi oleh pustakawan-pustakawan senior yang juga biasanya adalah birokrat senior. Cara seperti ini tentu saja kurang diminati oleh para pustakawan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, sehingga timbul perbedaan yang semakin lama semakin mencolok tentang cara-cara mengukur kompetensi profesional pustakawan di Indonesia. Imbauan agar pustakawan di swasta menerapkan jenjang seperti di pemerintah mengingat "perlunya keseragaman" (Rompas, 1996) kurang mendapat sambutan.

- 6.9. Besarnya peran dan pengaruh negara juga disebabkan oleh lemahnya peran dan pengaruh institusi non-negara / non-pemerintah terhadap kepustakawanan Indonesia. Menarik untuk dicatat di sini, bahwa pustakawan yang bekerja di perpustakaan khusus atau di pusat-pusat dokumentasi tidak mengembangkan asosiasi tersendiri, setelah upaya mereka lewat Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia (HPCI) dihentikan tahun 1973. Desakan agar pustakawan khusus, *information officer*, dan dokumentalis untuk melebur menjadi "pustakawan" secara umum rupanya lebih kuat daripada minat mengembangkan profesionalisme yang lebih spesifik. Demikian pula kelompok pustakawan perguruan tinggi, tidak terlihat aktif mengembangkan himpunan tersendiri. Padahal, sektor swasta dan lembaga non-pemerintah banyak mempekerjakan pustakawan khusus maupun pustakawan perguruan tinggi. Profesionalisme mereka yang bekerja di swasta ini tumbuh secara terpisah dari rekan-rekan mereka di lembaga-lembaga pemerintah, dan tidak terhimpun secara formal sebagaimana IPI. Namun jaringan-jaringan kerja antara pustakawan swasta tumbuh dalam bentuk kerjasama dan pertukaran atau pemakaian sumberdaya bersama (*resource sharing*) baik formal maupun informal, terutama setelah teknologi informasi mulai berkembang di Indonesia. Perpustakaan-perpustakaan swasta pada umumnya lebih leluasa menerapkan teknologi informasi karena adanya dana yang cukup atau juga karena relatif tidak terilit birokrasi. Ini menyebabkan sebagian pustakawan swasta merasa lebih beruntung daripada rekannya di pemerintahan (lihat misalnya tulisan Suryaningsih, 1996).
- 6.10. Walaupun belum ada penelitian yang seksama, namun dapat dikatakan bahwa perkembangan perpustakaan, pusat informasi, maupun unit-unit manajemen rekod di sektor swasta saat ini telah melahirkan sekelompok profesional informasi yang menghadapi persoalan berbeda. Jika rekan-rekan mereka di pemerintah berurusan dengan birokrasi dan politisasi negara, maka para profesional di swasta ini senantiasa menghadapi tantangan untuk menyediakan jasa yang terpakai. Ukuran keberhasilan di swasta menyebabkan pustakawan merasa perlu melakukan re-orientasi dari teknis dan birokrasi perpustakaan ke pemakai jasa mereka (misalnya, lihat Basri 1996). Perlu kiranya diingat, di lembaga-lembaga swasta ukuran keberhasilan layanan ini bisa menentukan karir si pustakawan, sehingga -mungkin tidak secara disadari-profesionalisme di sektor swasta ini lebih ditentukan oleh hubungan profesi-klien daripada oleh teknik-mekanistik yang dipakai sebagai penentu di lembaga-lembaga pemerintah.
- 6.11. Unsur lain di kepustakawanan Indonesia yang juga kurang banyak diamati dan kurang berkembang adalah perpustakaan-perpustakaan umum yang dikelola swasta dengan tujuan-tujuan pengabdian. Termasuk dalam kategori ini sebenarnya adalah

perpustakaan-perpustakaan lembaga kebudayaan asing dan perpustakaan lembaga keagamaan. Sebenarnya, kita bisa melihat kaitan antara perkembangan perpustakaan *philanthropist* ini dengan ide tentang masyarakat madani dan libertarianisme. Perpustakaan umum di negara-Inggris, misalnya, tumbuh oleh gerakan-gerakan kaum sipil yang menginginkan sebuah masyarakat berpengetahuan sebagai pondasi demokrasi (lihat Murrison, 1988). Di Amerika Serikat, pertumbuhan perpustakaan umum berkaitan erat dengan kebangkitan asosiasi para pekerja, perjuangan kelas yang menajam, serta munculnya "kelas menengah" dalam bentuk asosiasi wanita dan lembaga-lembaga non-pemerintah (Jackson, 1974). Ketiadaan gerakan mendirikan perpustakaan yang dipromotori oleh masyarakat di Indonesia mungkin bisa dikaitkan dengan ketiadaan gerakan "kelas menengah". Sebagaimana dikatakan Crouch (1993), tradisi dan latar politik Indonesia memang berbeda dibandingkan Eropa. Kelas tengah di Indonesia ditekan oleh kaum teknokrat yang berkoalisi dengan penguasa model patrimonialisme dan birokrat Orde Baru. Jadi, sudahlah kepustakawanan Indonesia dibangun oleh tradisi kolonial dengan tujuan penjajahan, masyarakat Indonesia sendiri juga tidak memiliki tradisi liberal yang di Eropa justru menumbuhkan kepustakawanan.

7. Profesionalisme dan Pendidikan Pustakawan Indonesia

- 7.1. Kalau melihat sejarahnya, maka sekali lagi jelas bahwa negara dan pemerintah adalah pencetus utama pendidikan pustakawan di Indonesia. Bermula dari Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan yang kemudian berubah menjadi Kursus Pendidikan Ahli Pendidikan (perhatikan perubahan dari "pegawai" menjadi "ahli"), sistem pendidikan awal pustakawan sepenuhnya bergantung pada inisiatif pemerintah dan tokoh-tokoh pemerintahan. Setelah orang-orang Indonesia mendapat pendidikan di Belanda, nama pendidikan pun berubah menjadi Sekolah Perpustakaan yang nampaknya dianggap lebih tinggi dibandingkan "kursus" semata. (lihat Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia, 1998). Diperlukan "keberanian" cukup besar untuk mengubah Sekolah Perpustakaan menjadi Jurusan Ilmu Perpustakaan di tahun 1961 (perhatikan penggunaan istilah "ilmu")³. Selain itu, masuknya sistem pendidikan pustakawan ini ke kampus (pertama ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, lalu ke Fakultas Sastra) melahirkan dikotomi baru, karena pemerintah tetap melanjutkan upaya mendidik tenaga pustakawan lewat Pusat Pengembangan Perpustakaan.
- 7.2. Perubahan lain yang perlu dicatat adalah masuknya pengaruh Amerika Serikat (AS) lewat Dr. Robert D. Stevens dari University of Hawaii Graduate School di tahun 1970 yang nampaknya mengubah orientasi Jurusan Ilmu Perpustakaan dari Belanda ke AS. Lewat Stevens lah pendidikan pustakawan di Indonesia mulai melanjutkan "mengimpor" prinsip-prinsip kepustakawanan Barat, baik dengan mendidik para dosen maupun dengan memberikan bantuan buku-buku bacaan (lihat Rungkat, 1997). Patut digarisbawahi di sini bahwa minat pengembangan pendidikan pustakawan sejak 1970 semakin mengarah ke konsep profesionalisme yang berkembang di Anglo-Saxon, terutama dengan menekankan pentingnya universitas sebagai produsen ketrampilan tingkat manajerial. Tetapi, selain menghasilkan lulusan yang berstatus sarjana, strategi ini tampaknya juga mulai memperlihatkan

³ Pada tahun 1991, Jurusan Ilmu Perpustakaan mencoba menegaskan "objek ilmu" ini lewat beberapa proses diskusi, sehingga tercapai kesepakatan awal tentang definisi "ilmu perpustakaan". Proses ini tidak berlanjut sehingga belum ada kata final tentang ini.

perbedaan pendapat tentang prioritas pendidikan pustakawan di Indonesia. Sebagaimana dikatakan Rungkat, terjadi perbedaan pendapat di antara para konsultan (Ward versus Williamson) tentang perlu tidaknya pendidikan sarjana diprioritaskan. Ward menganggap Indonesia masih perlu ribuan tenaga non-sarjana, sehingga pendidikan setingkat kursus dan diploma lebih penting daripada tingkat sarjana. Perdebatan seperti ini terjadi pula di kalangan pemerhati kepustakawanan Indonesia (lihat misalnya Hariadi, 1983; Sulistyio-Basuki, 1986 dan tanggapannya oleh Zultanawar, 1986). Kebutuhan akan tenaga non-sarjana mendapatkan jawabannya dari pendirian program-program diploma, seperti yang misalnya dirintis oleh Universitas Hasannuding Ujung Pandang sejak 1978.

- 7.3. Perdebatan tentang "sarjana" dan "non-sarjana" sebenarnya menyembunyikan perdebatan yang lebih mendasar tentang pendidikan "praktisi" versus "teorisi" yang juga terjadi di seluruh dunia kepustakawanan. Morehead (1980) sudah mengingatkan bahwa pendidikan pustakawan tidak pernah bisa sepenuhnya mengabaikan komponen praktik, juga tidak bisa hidup tanpa eksperimen teoritis. O'Connor dan Mulvaney (1996) menyatakan bahwa pengajar bidang perpustakaan melayani dua *masters* sekaligus, yaitu pihak akademisi dan pihak praktisi. Di Indonesia, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena untuk sebagian besar keperluan lokal, kepustakawanan yang dikembangkan lewat lembaga-lembaga pendidikan terlalu "barat".⁴ Selain itu, muncul berbagai keberatan tentang perlunya seorang pustakawan menulis skripsi yang membutuhkan penelitian -sebuah syarat yang merupakan keputusan nasional untuk semua pendidikan sarjana. Di lain pihak, penelitian bukanlah sesuatu yang ditekankan di dalam pendidikan pustakawan di Indonesia, sehingga otoritas teoritis dari universitas sering dipertanyakan oleh pihak praktisi. Hal-hal seperti ini menambah "ketegangan" (walaupun terselubung) antara dunia praktisi dan dunia akademisi yang mempengaruhi perkembangan profesionalisme pustakawan di Indonesia.

- 7.4. Pada tahun 1980an, kepustakawanan Indonesia mendapat banyak bantuan material dan dana untuk pengembangan sumberdaya manusia lewat World Bank. Selain menambah jumlah pustakawan yang berpendidikan "barat", bantuan ini juga meningkatkan keterpaan kepustakawanan Indonesia kepada teknologi informasi. Pada era yang sama dunia informasi Indonesia sebenarnya mengalami transformasi cukup fundamental setelah komputer menjadi semakin banyak dipakai. Tuntutan ketrampilan menggunakan teknologi informasi di kalangan pustakawan semakin kentara, terutama di kalangan mereka yang bekerja di swasta, tetapi juga yang di perpustakaan perguruan tinggi negeri. Pendidikan pustakawan Indonesia dapat dikatakan kewalahan menghadapi tuntutan ini, sehingga selain belajar ke luar negeri para profesional informasi juga mencari pendidikan di luar pendidikan perpustakaan, atau lewat kursus-kursus yang diadakan para praktisi. Dengan demikian, sumber kompetensi untuk profesional informasi tidak lagi dimonopoli oleh sekolah yang memakai judul "ilmu perpustakaan". Secara tidak langsung otoritas universitas berkurang. Sebenarnya, hal inilah yang antara lain mendorong penulis bersama Profesor Sulistyio-Basuki dan Binny Buchori MLS mengkoordinasikan terbentuknya pendidikan magister di Universitas Indonesia di tahun 1990 (sekarang telah menjadi Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan). Tetapi upaya mengembalikan otoritas ilmiah dan teknologi ke kampus ini juga tidak sepenuhnya dapat menjawab persoalan utama menyangkut kebutuhan lapangan dan kesenjangan

⁴ Seorang konsultan Australia, D.H. Bochart yang bertugas ke Ujung Pandang, Malang dan Denpasar mencatat keluhan tentang hal ini pertama kali di tahun 1973. Lihat Rungkat, 1997 h. 55.

"teori" dan "praktik", baik karena kurangnya penelitian teoritis, sedikitnya tenaga pengajar yang berkualitas, maupun tidak memadainya sarana laboratorium.

8. Kesimpulan : Otonomi dan Masa Depan Pustakawan Indonesia

- 8.1. Otonomi pustakawan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari "kebenaran sejarah" yang menunjukkan besarnya pengaruh negara dan pemerintah di masa kolonial yang berlanjut sampai masa kemerdekaan. Sifat pemerintahan dan perkembangan politisasi negara, dengan demikian, sangat mempengaruhi otonomi pustakawan. Dalam setiap orde, profesi ini menjadi perpanjangan pemerintah untuk mengurus negara menurut pandangan politik penguasa waktu itu. Dapat dikatakan, kepastakawanan Indonesia berawal dari "kepastakawanan negara" yang melahirkan pustakawan pegawai negeri. Akibat logis dari ini adalah : otonomi dan profesionalisme pustakawan Indonesia harus pertama-tama mempersoalkan otonomi dan profesionalisme pegawai negeri. Sebagaimana diuraikan pada butir 5.3, maka hal ini akan berkaitan dengan "akuntabilitas" (ketaatan kepada hukum dalam kerangka *good governance*), "ketanggapan" (komitmen kepada janji politik) dan "tanggungjawab" (keterikatan etik dan ketrampilan profesional). Bagi pustakawan pegawai negeri, *the art of being professional* seringkali merupakan ketrampilan khusus untuk mengelola ketiganya. Ia tidak lagi bisa semata-mata menjadi birokrat pemerintahan, dan tidak bisa lagi lepas dari tanggungjawab politis, birokratis maupun profesionalnya.
- 8.2. Sementara itu, perkembangan perpustakaan di luar lembaga pemerintah membutuhkan komitmen yang berbeda. Para pustakawan swasta Indonesia menghadapi tantangan yang terutama datang dari semakin banyak dan meluasnya penggunaan berbagai teknologi informasi dan telekomunikasi (telematika). Otonomi pustakawan di wilayah swasta ini akan berhadapan dengan tuntutan profesionalisme berbeda yang ditandai oleh adanya hubungan profesi-klien berbasis bisnis. Ukuran-ukuran efisiensi dan efektifitas bisnis akan dikenakan kepada mereka dengan implikasi kepada karir yang sangat berbeda dengan karir pegawai negeri. Tanpa penelitian dan pengamatan yang lebih serius, sulit mengetahui sifat hubungan profesi-klien di kalangan pustakawan swasta. Namun dari pengamatan sepintas dapat dikatakan bahwa profesional di swasta Indonesia saat ini menghadapi persoalan ketiadaan standar pengukuran kompetensi yang menyebabkan mereka tidak berdaya berhadapan dengan pasar pemakai tenaga kerja. Di masa yang tidak lama lagi, persoalan ini akan semakin pelik mengingat kesepakatan perekonomian dunia (APEC, misalnya) mengizinkan profesi dari luar Indonesia berkiprah di sini. Apa yang terjadi di kalangan insinyur Indonesia, misalnya, bisa juga terjadi di pustakawan dan profesional informasi Indonesia.
- 8.3. Perkembangan pendidikan dan penelitian bidang ilmu informasi, perpustakaan, dan kearsipan akan sangat bergantung kepada kemampuan universitas memberikan otoritas ilmu dan teknologi. Hampir sama dengan keadaannya di tahun 60-an, sekolah-sekolah perpustakaan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menyediakan lulusan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Selain itu, jika dikotomi "praktik - teoritik" tidak bisa dijernihkan oleh sekolah-sekolah perpustakaan, maka profesionalisme pustakawan akan sulit mengandalkan otoritas keilmuannya kepada universitas. Akibatnya, universitas bukanlah sumber otonomi profesional informasi dan sulitlah bagi lulusannya untuk mengandalkan ijazah atau sertifikasi yang diterimanya untuk berhadapan dengan pasar pengguna tenaga kerja. Dalam perkembangan teknologi seperti sekarang ini, maka universitas perlu terus-menerus

meninjau kurikulumnya serta menselaraskannya dengan kondisi di luar kampus. Penelitian dan pengembangan (*research and development*) harus menjadi program utama di setiap sekolah perpustakaan. Ini membutuhkan tidak saja komitmen para akademisi, tetapi juga kemampuan ilmiah yang tidak dikembangkan di sekolah-sekolah perpustakaan Indonesia pada era 60 sampai 80. Selain itu, konvergensi teknologi juga mensyaratkan konvergensi dalam ilmu dan pendidikan pustakawan, sehingga sejak sekarang orientasi pendidikan harus melihat pula kemungkinan silang-ilmu dan multi-disiplin. Pembahasan tentang "ilmu perpustakaan dan informasi" bukannya harus berhenti, tetapi justru harus dimulai lagi karena semakin relevan dengan kondisi saat ini. Namun pembahasan ini harus meluas ke persoalan aplikasi ilmu di dalam kondisi sesungguhnya, sehingga jarak antara pengajaran dan penerapan tidak terlalu jauh.

8.4. Organisasi profesi pustakawan di Indonesia hanya akan bertahan hidup jika pengurusnya mampu mengelola momentum internal organisasi dan kekuatan penekan sebagaimana diuraikan di atas (negara, pasar, universitas). Secara khusus, Ikatan Pustakawan Indonesia perlu meninjau dengan sungguh-sungguh posisinya di tengah fenomena yang dijelaskan pada butir 8.1 sampai 8.3 di atas. Hal-hal yang bisa dilakukannya adalah:

- a) Menegaskan netralitas dan independensi dengan mengurangi ketergantungan kepada institusi-institusi negara yang selama ini secara tradisional mengembangkannya. Ini perlu dilakukan dalam rangka mendukung upaya pustakawan pegawai negeri untuk mengembangkan otonomi berdasarkan akontabilitas, ketanggapan, dan tanggungjawab profesional. Selain itu, netralitas dan independensi ini bisa mengundang para proponent masyarakat madani untuk mengembangkan aspirasi mereka lewat kepustakawanan Indonesia.
- b) Membuka jalur komunikasi intensif dengan pasar dan industri pemakai tenaga profesional di luar negara. Salah satu harapan pustakawan yang bisa ditumpukan kepada IPI adalah peningkatan posisi tawar mereka di hadapan penyewa tenaga kerja (*employer*). Sebaliknya, kepada pihak perusahaan dan industri, organisasi profesi bisa memberi jaminan kualitas kompetensi anggota-anggotanya. Ini hanya bisa dilakukan jika organisasi profesi mampu secara transparan memperlihatkan kepada dunia industri proses penerimaan anggotanya, dan sebaliknya mampu memahami kebutuhan serta kondisi sesungguhnya dari dunia industri yang mempekerjakan pustakawan di Indonesia. Untuk ini, IPI bisa mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok kepentingan dan terfokus (*interest group, focused group*) yang mencerminkan kondisi industri informasi di Indonesia sesungguhnya. Hal ini membutuhkan kepemimpinan (*leaderships*) yang berbeda dari sebelumnya. Pemimpin IPI di masa mendatang adalah pemimpin yang mendorong desentralisasi, bukan yang menghimpun kekuasaan terpusat di sekelilingnya.
- c) Mengatur kembali posisi IPI *vis a vis* institusi pendidikan perpustakaan. Organisasi ini perlu merumuskan perannya sebagai mitra para akademisi dengan menjadi penyalur tuntutan kompetensi dari pasar dan anggotanya. Ini adalah peran kritis karena organisasi profesi diharapkan bisa ikut memeriksa kurikulum pendidikan. Namun untuk itu dibutuhkan pengurus yang berkompeten, dan salah satu sumbernya adalah himpunan alumni. Kerjasama IPI dengan himpunan alumni akan membuka akses organisasi ini ke sekolah-sekolah perpustakaan. Hubungan seperti ini akan berbeda dibandingkan hubungan lewat individu-

individu lulusan sebuah sekolah perpustakaan atau hubungan langsung ke pengurus sekolah-sekolah perpustakaan. Hubungan dengan himpunan alumni memungkinkan IPI bersikap lebih kritis. Selain itu, himpunan alumni sekaligus memberi akses ke dunia kerja mereka.

Akhirnya, makalah ini harus ditutup dengan himbauan kepada kita semua agar menyadari bahwa tantangan yang akan dihadapi pustakawan Indonesia di masa depan tidaklah kecil atau mudah. Otonomi pustakawan dengan prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas merupakan hanya salah satu cara saja untuk menghadapi tantangan itu. Hal lain yang mendesak untuk dikerjakan misalnya adalah kepastian hukum tentang sistem informasi di Indonesia. Sudah waktunya bagi IPI untuk juga memperhatikan dan memihak kepada masyarakat luas yang saat ini menghadapi berbagai persoalan berkaitan dengan perkembangan teknologi yang mengancam kehidupan pribadi (*privacy*), kontrol penguasa terhadap masyarakat, sensor, dan plagiarisme di bidang ilmu.

Daftar Bacaan

- Basri, Elly J. (1996), "Jasa informasi bagi pemakai perpustakaan LPPM" dalam *Prosiding Seminar Sehari Layanan Pusdokino Berorientasi Pemakai : Pandangan Akademisi dan Praktisi*, Jakarta : Program Studi Ilmu Perpustakaan.
- Cigler, B. (1990). *Public Administration and Paradox of Professionalism*. Public Administration Review, Vol. 50, November/December, pp. 637-653.
- Crouch, Harold (1993), "Hilangnya kelas menengah di masa Orde Baru" dalam *Kelas Menengah Digugat*, Happy B. Zulkarnaen et. al (editor), Jakarta : Fikahati Aneska.
- Freidson, Eliot (1994), "Method and substance in the comparative study of professions", pidato pembukaan, *Conference on Regulating Expertise - Paris April 14 1994*. diturunkan dari <http://itsa.ucsf.edu/~eliotf> pada 10 Agustus 1998.
- Habermas, J (1977) *Knowledge and human interests* Boston Ma., Beacon Press.
- Handy, C (1989) *The age of unreason* London, Century Business
- Hardjo-Prakoso, Mastini (1975) "Government policies affecting development and growth of libraries in Indonesia" dalam *Proceeding of the Third Conference of South East Asian Libraries*, Jakarta : Ikatan Pustakawan Indonesia.
- Hariadi, Sri Sanuti (1983), "Pendidikan program diploma perpustakaan di Indonesia", *Majalah Ilmu Perpustakaan dan Informatika*, Januari-Agustus, h. 4 - 11.
- Hudson, Hugh D. Jr. (1994). *Blueprints and Blood: The Stalinization of Soviet Architecture, 1917-1937*. Princeton, NJ: Princeton University Press;
- Huque, Ahmed S., Jermain TM Lam, Jane CY Lee (1996) *Public Administration in the NICs*, London : McMillan Press.
- Jones, Anthony. (ed.). (1991). *Professions and the State: Expertise and Autonomy in the Soviet Union and Eastern Europe*. Philadelphia, PA: Temple University Press
- Kuntowijoyo (1987) *Budaya dan Masyarakat* Yogyakarta : Tiara Wacana.

- Lester, Stan (1995) "Beyond Knowledge and Competence towards a framework for professional education" *Capability* 1 (3) 44-52.
- Montgomery, Van Wart. (1998). *Changing Public Sector Values*. New York : Galland Publishing, Inc.
- Morehead, J. (1980), *Theory and Practice in Library Education*, Chicago : Libraries Unlimited.
- Mosher, Frederick C. (1968). *Democracy and Public Service*. New York: Oxford University Press, pp. 3, 101-106.
- Murrison, W.J. (1988), *The Public Library : its Origin, Purposes, and Significance*, London : G.O. Harrop.
- O'Connor, D. dan J.P. Mulvaney (1996), "LIS facultie research and expectations of the accademic culture versus the needs of the practitioners" dalam *Journal of Education for Library and Information Science*, v 37 no 4, h. 306 - 316.
- Pendit, Putu Laxman (1988), *Public Library and Adult Education in Great Britain and Indonesia : Comparison as Learning*. Thesis untuk M.A. in Library and Information Science, Loughborough University of Technology, Inggris (tidak diterbitkan).
- _____ (1992a), *Ilmu perpustakaan dan kepastakawanan Indonesia*. Makalah untuk diskusi panel "Perpustakaan Teoritis, Praktisi dan Organisasi Pustakawan dalam Era Globalisasi Informasi" diselenggarakan Komisi Profesi dan Komisi Usaha Pengurus Besar Ikatan Pustakawan di Perpustakaan Nasional Jakarta, 21 Maret 1992.
- _____ (1992b), *Model untuk kepastakawanan Indonesia : sebuah usul pendahuluan*. Makalah pendukung untuk Kongres VI dan Seminar Perpustakaan Ikatan Pustakawan Indonesia, Padang 18 - 20 November 1992.
- _____ (1993), *Perpustakaan umum, golongan menengah, dan demokratisasi : sebuah tinjauan awal tentang sejarah peran perpustakaan umum dalam masyarakat Indonesia*. Laporan Penelitian OPF Fakultas Sastra Universitas Indonesia 1993-1994 (tidak diterbitkan).
- Riggs, Fred C. (1997). *Coups and Crashes: Lessons for Public Administration*. In Farazmand, Ali. (ed.). (1997). *Modern Systems of Government: Exploring the Role of Bureaucrats and Politicians*. Thousand Oaks, London: SAGE Publications, p. 25.
- Rompas, J.P. (1996), "Standar jabatan dan kepangkatan di kalangan pustakawan" dalam *Majalah Ikatan Pustakawan Indonesia* v 18 no 1-2, h. 16 - 22.
- Rockman, Bert A. (1997). "Honey, I Shrank the State." *On the Brave New World of Public Administration*. In Farazmand, Ali. (ed.). (1997). *Modern Systems of Government: Exploring the Role of Bureaucrats and Politicians*. Thousand Oaks, London: SAGE Publications, p. 281.
- Rungkat, Thelma (1997), *Education and Training for Librarianship in Indonesia 1945 - 1984*, Melbourne : Ancora Press.
- Setiadi, Hilmar Farid (1991), "Kolonialisme dan budaya : Balai Poestaka di Hindia Belanda" dalam *Prisma* no. 10 th. XX, Oktober, h. 23 - 46.

- Sulistyo-Basuki, L. (1986), "Pendidikan pustakawan Indonesia serta luarannya", dalam *Prosiding Seminar dan Rapat Kerja IPI Oktober 24 - 26 1985 di Bandung*, Jakarta : PB IPI, h. 17 - 24.
- _____ (1998), "The rise and growth of libraries in pre-war Indonesia" dalam *Library History*, v. 14, h. 55 - 64.
- Suryaningsih, Sri (1996), "Sumbangan pemikiran tentang peran dan status perpustakaan / pustakawan swasta" dalam *Prosiding Rapat Kerja Pusat VIII dan Seminar Ilmiah IPI di Kuta 8 - 11 Desember 1996*, Jakarta : PB IPI.
- Tjoen, M. J. dan S. Pardede (1966), *Perpustakaan Indonesia dari Zaman ke Zaman*. Jakarta : Kantor Bibliografi Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Williamson, W.L (1999), "Library consultant in Indonesia : the work of AGW Dunningham" dalam *Library Quarterly*, v. 69. h. 57 - 67.
- Zultanawar (1986), "Tanggapan atas makalah Dr. Sulistyo-Basuki" dalam *Prosiding Seminar dan Rapat Kerja IPI Oktober 24 - 26 1985 di Bandung*, Jakarta : PB IPI, h. 32 - 34.